

## **POTENSI KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA PANTAI BAHAGIA BEKASI**

*(Potential of Local Institutions in Mangrove Forest Management in Pantai Bahagia Village Bekasi)*

Elfis Metkono<sup>1</sup>, Messalina L. Salampessy<sup>2</sup> dan Ina Lidiawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa  
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 4 Tanah Sereal – Bogor 16166, Indonesia

<sup>1</sup>e-mail: [elfismetkono77@gmail.com](mailto:elfismetkono77@gmail.com)

<sup>2</sup>e-mail: [meisforester76@gmail.com](mailto:meisforester76@gmail.com)

<sup>3</sup>e-mail: [inalidiawati@yahoo.co.id](mailto:inalidiawati@yahoo.co.id)

Corresponding author: [meisforester76@gmail.com](mailto:meisforester76@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Limited community knowledge about the functions and benefits of mangrove ecosystems, as well as management and utilization without regard to sustainability, causes damage to mangrove ecosystems, as a result logging for the conversion of mangrove land into pond land continues to increase. Community institutions in efforts to preserve mangrove forests have an important role, therefore, this study aims to analyze the potential for local institutional support in mangrove forest management. The sampling method is based on the analysis of key figures of communities involved in mangrove forest management. The data collection method was conducted by in-depth interviews of 30 respondents and the analysis used in this study was qualitative descriptive analysis. The results of the study explained that the situation shows that some mangrove forests have been damaged and community activities are still concentrated on pond processing. The structure shows that the authority in mangrove forest management is specifically regulated by the village government and Perum Perhutani while community groups as partners. Behavior illustrates that the community has access to the utilization of mangrove forest potential for both food and board processing, and performance shows that the use of mangrove forests is still limited to processing fruit for food needs.*

*Keywords: coastal communities, local institutions, mangrove forests.*

### **ABSTRAK**

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat ekosistem mangrove, serta pengelolaan dan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove, akibatnya penebangan untuk pengalihfungsian lahan mangrove menjadi lahan tambak terus menerus meningkat. Kelembagaan masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove memiliki peran penting, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dukungan kelembagaan lokal dalam pengelolaan hutan mangrove. Metode pengambilan sampel adalah berdasarkan analisis tokoh kunci terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 30 responden dan Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan *Situasi* memperlihatkan sebagian hutan mangrove telah mengalami kerusakan dan terlihat kegiatan masyarakat masih terkonsentrasi pada pengolahan tambak. *Struktur* memperlihatkan kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove diatur khusus oleh pemerintah desa dan Perum Perhutani sedangkan kelompok masyarakat sebagai mitranya. *Perilaku* menggambarkan bahwa masyarakat memiliki akses untuk pemanfaatan potensi hutan mangrove baik untuk olahan pangan maupun papan, dan *kinerja* memperlihatkan pemanfaatan hutan mangrove masih terbatas pada pengolahan buahnya untuk kebutuhan pangan.

Kata Kunci: *hutan mangrove, kelembagaan lokal, masyarakat pesisir*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi dimana salah satunya adalah ekosistem mangrove, dan merupakan yang terluas di dunia. Indonesia mempunyai panjang garis pantai sebesar 95,181 km dan luas hutan mangrove sebesar 3.489.140,68 Ha. Pada tahun 2015, jumlah ini setara dengan 23% ekosistem mangrove dunia dari total luas 16.530.000 Ha. Luas mangrove di Indonesia yang dalam kondisi baik diketahui seluas 1.671.140,75 Ha, sedangkan dalam kondisi rusak seluas 1.817.999,93 Ha (Kehutanan, 2017). Hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia memiliki luas  $\pm 70$  ha, dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat dikarenakan masyarakat telah menyadari bahwa keberadaan hutan mangrove ini telah melindungi tambak-tambak mereka dari abrasi air laut (Marsudi *et al.*, 2018).

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat berbeda-beda di setiap wilayah sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakatnya. Masyarakat merupakan faktor penentu dalam pengelolaan hutan mangrove secara lestari (Alfandi *et al.*, 2019). Akses masyarakat untuk memperoleh, mengontrol dan mengatur pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) hutan mangrove dan peran para pihak memegang peranan penting bagi kelestarian fungsi dan peranan lingkungannya. Untuk itu penguatan kelembagaan lokal di tingkat desa ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Salampessy *et al.*, 2017).

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat ekosistem mangrove, serta pengelolaan dan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove itu sendiri. Hal ini menyebabkan banyaknya lahan mangrove yang rusak akibat

penebangan untuk pengalih fungsian lahan mangrove menjadi lahan tambak sehingga secara terus menerus luasan ekosistem mangrove di Desa Pantai Bahagia semakin berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dukungan kelembagaan lokal (*situasi, struktur, perilaku dan kinerja*) dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang berada di wilayah pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Pengambilan data berlangsung selama satu bulan pada bulan Juli 2020.

### B. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah alat tulis, bahan kuesioner, dan panduan wawancara.

### C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tokoh dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi.

### D. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara secara langsung melalui wawancara dengan bantuan kuesioner, observasi lapang dan panduan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder adalah data yang berkaitan dengan penelitian tetapi diperoleh secara tidak langsung dari responden namun informasi yang diperoleh

dari dokumen, arsip dan laporan. Data tersebut meliputi: Keadaan umum wilayah, data potensi wilayah, data anggota pengelola hutan mangrove, dan data dokumentasi kegiatan.

### E. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data diawali dengan kegiatan penentuan responden. Responden berjumlah 30 orang, dipilih berdasarkan kriteria keaktifan anggota dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove. Selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam dilakukan terhadap 30 responden tersebut dengan menggunakan panduan kuesioner. Wawancara terhadap tiga tokoh kunci yaitu kepala desa, ketua kelompok dan mandor tanam Perum Perhutani.

### F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data - data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya berdasarkan teori analisis *Situation Structure Behaviour Performance* (Schmid, 1987).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

#### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden terdiri dari beberapa variabel seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan tingkat pendapatan.

- Responden terdiri dari 46,7% laki-laki dan 53,3% berjenis kelamin perempuan.
- Umur responden terdiri dari kelompok umur 30-49 tahun sebanyak 36,7%, kelompok umur 20-

29 tahun sebanyak 13,3% dan kelompok >50 tahun sebanyak 13,3%, Tingkat pendidikan responden.

- Pendidikan responden menunjukkan bahwa sebanyak 13,3% responden tidak bersekolah, 50% lainnya Sekolah Dasar (SD), 10% Sekolah Menengah Pertama (SMP), 23,3% Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sisanya (3,3%) pendidikan sarjana.
- Mata pencaharian responden menunjukkan bahwa sebanyak 46,7% responden bermata pencaharian sebagai ibu rumah tangga, 43,3% bekerja sebagai nelayan, sisanya sebagai pedagang, petani tambak, dan guru masing-masing 3,3%.

#### 2. Potensi Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

##### a. Situasi

Situasi pengelolaan hutan mangrove meliputi gambaran sumber daya hutan dan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian.

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang kondisi hutan mangrove, terdiri dari:
  - 53,3% : pengetahuan masyarakat tentang kondisi hutan mangrove yang semakin berkurang luasannya dan mengalami kerusakan
  - 30% menyatakan bahwa kondisi hutan semakin berkurang dari jumlah tegakan yang ada
  - 6,7% menyatakan cukup lebat dan subur
  - 3,3% menyatakan hutan banyak mengalami kerusakan dan dialihfungsikan sebagai tambak
- 2) Peran masyarakat untuk melestarikan mangrove, menunjukkan bahwa:
  - 40% peran masyarakat hanya dilibatkan dalam kegiatan penanaman mangrove
  - 33,3% menyatakan masyarakat berperan aktif dalam perlindungan,

- pelestarian, dan pemanfaatan hutan mangrove
- 16,7% masyarakat berperan khusus untuk perlindungan mangrove
  - 6,7% masyarakat berperan khusus untuk pemanfaatan potensi yang ada
  - 3,3% masyarakat berperan untuk pelestarian hutan mangrove
- 3) Pengetahuan masyarakat tentang kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Desa Pantai Bahagia memperlihatkan bahwa:
- 73,3% menyatakan bahwa seluruh bagian hutan telah mengalami kerusakan dan jumlah tegakannya berkurang drastis sehingga sering terjadi abrasi pantai
  - 10% masyarakat menyatakan hanya beberapa bagian hutan tertentu mengalami berkurangnya jumlah tegakan dan Hutan mengalami sebagian besar kerusakan karena tambak yang dibuat
  - 6,7% menyatakan bahwa tidak ada kerusakan hutan tetap lestari
- 4) Ketertiban kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, diperoleh hasil:
- 43,3% masyarakat menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove hanya dilaksanakan oleh kelompok tertentu
  - 26,8% menyatakan bahwa hanya masyarakat yang peduli dengan hutan mangrove
  - 23,3% menyatakan semua masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan mangrove
  - 3,3% menyatakan hanya masyarakat yang memiliki izin dan tidak ada masyarakat yang dilibatkan
- 5) Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, memperlihatkan bahwa:
- 53,4% bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove masyarakat terlibat hanya dalam penanaman bila di ajak oleh pihak yang membutuhkan peran masyarakat
  - 20% masyarakat terlibat dalam kegiatan penanaman, apabila dianjurkan oleh pemerintah desa
  - 13,3% masyarakat terlibat dalam semua tahap kegiatan pengelolaan
  - 10% masyarakat terlibat khusus dalam perencanaan dan implementasi/pelaksanaan kegiatan penanaman hutan
  - 3,3% masyarakat tidak dilibatkan
- b. Struktur
- Struktur pada bagian ini meliputi aspek keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan, pengaturan lahan-lahan di kawasan hutan, proses perencanaan dan pengelolaan, serta aturan-aturan yang mengatur pengelolaan hutan mangrove.
- 1) Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan mangrove
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
- 40% pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan mangrove adalah pemerintah desa, pihak terkait yang dilibatkan *Corporate Sosial Responsibility*, Lembaga Swadaya Masyarakat (CSR, LSM dll) dan seluruh masyarakat, dalam pengelolaan hutan
  - 33,3% menyatakan bahwa pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu
  - 10% menyatakan bahwa Pemerintah Desa, masyarakat sekitar, dan pihak terkait yang dilibatkan *Corporate Sosial Responsibility*, Lembaga Swadaya Masyarakat (CSR, LSM dll)
  - 6,7% menyatakan bahwa pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh pihak terkait *Corporate Sosial Responsibility*, Lembaga Swadaya Masyarakat (CSR, LSM dll) dan kelompok tertentu.

- 2) Pihak yang mengatur pengelolaan lahan-lahan hutan mangrove  
Hasil penelitian menyatakan bahwa:
    - 43,4% pengelolaan lahan hutan mangrove diatur khusus oleh pemerintah desa
    - 23,3% diatur pengelolaannya oleh pemerintah desa dan perhutani
    - 13,3% diatur oleh perhutani dan pemilik lahan masing-masing
    - 6,7% disesuaikan dengan kepemilikan yang ada
  - 3) Pihak yang mengatur proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mangrove  
Hasil penelitian melalui wawancara memperlihatkan bahwa:
    - 46,7% menyatakan bahwa diatur oleh kelompok pelaksana kegiatan
    - 26,7% menyatakan bahwa diatur pengelolaannya oleh pemerintah desa dan kelompok pelaksana
    - 23,3% menyatakan bahwa diatur oleh pemerintah desa dan perhutani serta dikoordinasi bersama masyarakat
    - 3,3% menyatakan bahwa di atur pengelolaannya oleh pemerintah desa
  - 4) Aturan-aturan yang mengatur pengelolaan hutan mangrove  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
    - 66,7% menyatakan bahwa peraturan dari kelompok tertentu yang di berikan wewenang
    - 10% menyatakan bahwa peraturan dari pemerintah desa, dan adanya peraturan yang di tetapkan oleh perhutani dan pemerintah desa
    - 3,3% menyatakan bahwa adanya peraturan dari perhutani.
- c. Perilaku
- Perilaku pengelolaan hutan mangrove meliputi akses seluruh potensi hutan mangrove, dan batasan- batasan dalam pemanfaatan potensi serta sangsi bila melanggar batasan pemanfaatan hutan mangrove.
- 1) Akses masyarakat terhadap potensi hutan

mangrove

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 36.7% semua masyarakat memiliki akses
  - 23.3% menyatakan bahwa hanya kelompok yang ada
  - 20 % menyatakan bahwa hanya kelompok yang dikhususkan
  - 3,3% menyatakan bahwa kelompok tertentu yang diberikan wewenang oleh desa dan Perhutani
- 2) Batasan dalam pemanfaatan potensi pengelolaan hutan mangrove  
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:
    - 66,7% menyatakan bahwa ada pembatasan dimana seluruh hutan mangrove tidak boleh di tebang sembarangan karena merupakan hutan lindung
    - 13,3% tidak ada batasan yang mengatur
    - 10% dapat di dimanfaatkan seluruhnya untuk kebutuhan ekonomi masyarakat
    - 6,7% Masyarakat bebas memanfaatkan
    - 3,3% Sebagian dapat di dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi dengan syarat penanaman kembali
  - 3) Konsekuensi bila melanggar batasan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan mangrove  
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:
    - 43,3% menyatakan bahwa adanya konsekuensi dari kelompok konservasi
    - 16,6% menyatakan bahwa adanya konsekuensi dari kepala desa dan perhutani
    - 13,3% menyatakan bahwa tidak adanya konsekuensi yang diatur/ditetapkan
    - 10% menyatakan bahwa ada konsekuensi dari perhutani
- d. Kinerja
- Kinerja dalam pengelolaan hutan mangrove meliputi permasalahan yang ditemui

dalam pengelolaan hutan mangrove dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

1) Permasalahan dalam pengelolaan hutan mangrove

Hasil penelitian menyatakan bahwa:

- 40% masyarakat menyatakan bahwa hanya konflik internal antar warga
- 16,7% adanya berbagai konflik yang terkait dengan pemanfaatan lahan disekitar hutan mangrove dan penguasaannya untuk tambak dan konflik berhubungan dengan pemanfaatan lahan
- 13,3% tidak ada konflik

2) Manfaat hutan mangrove untuk masyarakat

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:

- 36,7% responden menyatakan bahwa manfaat hutan mangrove hanya potensi buahnya untuk berbagai olahan
- 33,3% sebagai potensi sumber ikan
- 30% berbagai potensi ekonomi tersedia

## B. Pembahasan

### 1. Situasi Kelembagaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Masyarakat memahami bahwa kondisi hutan mangrove saat ini semakin berkurang dan mengalami kerusakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bengen (2008) menjelaskan bahwa kerusakan mangrove dikarenakan adanya fakta bahwa sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Ilham et al, (2016) dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, dan sebagainya maupun penebangan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan.

Kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Desa Pantai Bahagia menurut hasil wawancara jumlah tegakannya berkurang drastis sehingga sering terjadi abrasi pantai. Sedangkan

berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa beberapa bagian hutan mangrove telah mengalami kerusakan serta terlihat kegiatan masyarakat masih terkonsentrasi pada tambak.

Peran masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia hanya terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove dan hanya kelompok tertentu saja yang terlibat. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* penting dalam pengelolaan kawasan hutan (Sihite, 2005). Demikian juga dengan Dahuri (2001) menjelaskan bahwa keberadaan kelompok swadaya masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Masyarakat yang ada di Desa Pantai Bahagia belum sepenuhnya ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove, untuk saat ini sudah ada beberapa kelompok yang terbentuk, namun belum semua aktif berperan dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove. Menurut hasil observasi lapangan bahwa terdapat satu kelompok sadar wisata Alipbata yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dengan tujuan utama Ingin membentuk *green belt/* sabuk hijau dipesisir untuk menahan abrasi, Untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan membantu dibidang pendidikan. Pengelolaan hutan mangrove dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan yaitu: Pembibitan, penanaman, perawatan, dan pemanenan daun dan buah mangrove untuk diolah menjadi sirup, dodol, kopi, teh, puding dan lain- lain. Sedangkan masyarakat yang diluar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alipbata hanya dalam kegiatan penanaman bila diajak oleh pihak yang membutuhkan peran masyarakat.

### 2. Struktur Kelembagaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Kelembagaan pengelolaan hutan mangrove secara umum dapat digambarkan bahwa pihak

yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya bersama yaitu pemerintah desa, pihak terkait yang dilibatkan *Corporate Sosial Responsibility*, Lembaga Swadaya Masyarakat (CSR, LSM dll) dan seluruh masyarakat dalam pengelolaan hutan. Menurut Harahap, (2009) bahwa adanya kelembagaan pengelolaan yang melibatkan semua elemen *stakeholder* bisa mencegah terjadinya kerusakan mangrove. Karena itu diperlukannya kesadaran bersama para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestariannya.

Kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove diatur khusus oleh pemerintah desa sebagai administrasi yaitu menerbitkan izin terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan mengelola biaya pajak dari masyarakat. Selanjutnya Perum Perhutani yang memiliki wewenang sebagai penyelenggara perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan, lebih menekankan pada tugas pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya alam termasuk kawasan hutan mangrove.

Sedangkan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alipbata sebagai Mitra dalam kegiatan penanaman mangrove dan juga dalam pemanfaatan produk olahan dari mangrove itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja.

Hubungan antar para pihak yang berkepentingan harus dilandasi dengan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun *Conflict of interest* dalam pengelolaan hutan mangrove, karena itu diperlukan peran dari fasilitator untuk memfasilitasi sampainya kebijakan pemerintah dan informasi serta inovasi pengelolaan hutan mangrove kepada masyarakat melalui program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta menyalurkan aspirasi serta keluhan masyarakat kepada pihak pemerintah Desa maupun pihak perum perhutani sebagai pemilik kawasan. Menurut hasil wawancara dengan ketua Kelompok

Sadar Wisata (Pokdarwis) Alipbata menyatakan bahwa belum adanya peran dari fasilitator bagi pengelolaan mangrove di Desa Pantai Bahagia. Karena itu masyarakat sangat berharap adanya fasilitator dari pemerintah daerah maupun perum perhutani untuk menyalurkan informasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan.

### **3. Perilaku Kelembagaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove**

Perilaku para pihak terhadap pemanfaatan sumberdaya yang ada di hutan mangrove dan sekitarnya sangat mempengaruhi kondisi dari ekosistem mangrove itu sendiri. Masyarakat yang ada di Desa Pantai Bahagia memiliki akses terhadap potensi mangrove yang ada. Aksesibilitas merupakan salah satu kunci utama yang akan mendukung keberhasilan pengembangan pada suatu kawasan, karena akan menghubungkan wilayah pengembangan dengan daerah luar (Muhaerin, 2008). Tingginya akses masyarakat untuk kegiatan tambak sangat berpengaruh terhadap fungsi ekosistem mangrove yang ada di Desa Pantai Bahagia Masyarakat memiliki ketergantungan terhadap tambak karena berpengaruh pada ekonomi masyarakat, sedangkan status lahan menurut pihak Perum Perhutani KPH Bogor adalah kawasan hutan produksi dan ada pembatasan dimana seluruh hutan mangrove tidak boleh di tebang sembarangan menurut Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konsekuensi yang diterima bila melanggar merujuk pada undang-undang tersebut yaitu dapat dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat dan ketua kelompok, sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan bagi masyarakat atau pihak yang melanggar aturan

yang telah dibuat terkait hutan mangrove, walaupun pada kenyataan dilapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang menyebabkan luas hutan mangrove terus berkurang akibat perluasan lahan tambak. Perum Perhutani memiliki kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan 3.013,54 Ha. Kawasan ini masuk dalam wilayah kerja RPH Muara Gembong, BKPH Ujung Karawang, KPH Bogor, untuk wilayah yang masuk dalam RPH Muara Gembong di Tugaskan 15 orang Polhut untuk melakukan pengawasan.

#### **4. Kinerja Kelembagaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove**

Menurut data dari Departemen Kehutanan (2001) dalam Novianty (2011) mengatakan bahwa, faktor keinginan manusia (masyarakat) dalam mengelola hutan mangrove maupun merusaknya sangatlah besar. Menurut Pradana *et al*, (2013), aspek ini merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi kinerja dari masyarakat dalam ikut serta untuk pengelolaan hutan mangrove. Sedangkan menurut Son Haji selaku ketua kelompok menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan mangrove yaitu alih fungsi lahan menjadi tambak, dan status kepemilikan lahan yang tumpang tindih antar pihak perum Perhutani dan pihak Desa.

Keterlibatan banyak pemangku kepentingan tanpa pengembangan kelembagaan yang mantap dapat menghambat program pengelolaan hutan mangrove bila tidak ada koordinasi yang baik antar para pihak, sehingga siapa yang berperan, siapa yang berpartisipasi dan apa yang dilakukan menjadi tidak jelas serta berpotensi menimbulkan konflik. Menurut Salamessy dan Lidiawati, (2017) Dominasi pemerintah juga diiringi oleh kebijakan yang secara sadar atau tidak ternyata mengakibatkan masyarakat cenderung menjadi objek dari suatu kebijakan. Pemerintah meluncurkan berbagai proyek atau program dan masyarakat melaksanakannya dengan membentuk kelompok-kelompok

pelaksana berupa kelompok kerja atau kelompok tani. Pola *top-down* seperti ini walaupun hasilnya tidak yang optimal, namun masih tetap berjalan hingga saat ini.

Berdasarkan informasi yang didapat terdapat beberapa konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan mangrove, yang pertama masyarakat diluar kelompok Alipbata memiliki kecemburuan terhadap masyarakat yang tergabung dalam kelompok tersebut, hal ini dikarenakan pengelolaan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dari beberapa perusahaan tidak melibatkan semua masyarakat melainkan hanya anggota yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) saja. Konflik lain yang juga ditemukan bahwa Perum Perhutani tidak tegas terhadap pihak yang melanggar aturan, dan juga desa sebagai fungsi administrasi tidak ada kerjasama dengan pihak perhutani dalam melakukan tindakan tegas, sebaliknya pihak Desa mengeluarkan surat ijin untuk masyarakat dalam kegiatan alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak dalam kawasan perhutani yang berakibat pada berkurangnya luas hutan mangrove. Manfaat yang di rasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengelola mangrove yaitu dari aspek ekonomi berupa hasil olahan dari daun dan buah mangrove yang dijadikan produk untuk dijual, sedangkan sebagian masyarakat diluar kelompok pengelola menyatakan manfaat yang dirasakan lebih ke aspek ekologis seperti mangrove dapat mencegah abrasi pantai dan sebagai habitat dari berbagai biota baik di darat maupun di laut.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Potensi kelembagaan lokal dalam pengelolaan hutan mangrove memperlihatkan antara lain :

1. Situasi memperlihatkan sebagian hutan mangrove telah mengalami kerusakan dan terlihat kegiatan masyarakat masih

terkonsentrasi pada pengolahan tambak, hal ini mengakibatkan keberadaan fungsi dan peran mangrove terganggu bahkan cenderung rusak.

2. Struktur memperlihatkan kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove diatur khusus oleh pemerintah desa dan Perum Perhutani yang memiliki wewenang sebagai penyelenggara perencanaan, pengurusan, perusahaan dan perlindungan di wilayah kerjanya. Sedangkan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alipbata sebagai Mitra dalam kegiatan pengelolaan mangrove. Pembagian peran ini belum berjalan dengan baik.
3. Perilaku menggambarkan bahwa masyarakat memiliki akses untuk pemanfaatan potensi hutan mangrove baik untuk olahan pangan maupun papan. Namun akses ini cenderung digunakan untuk memperluas jumlah tambak sehingga kondisi hutan semakin berkurang.
4. Kinerja memperlihatkan bahwa adanya konflik yang terkait dengan pemanfaatan lahan disekitar hutan mangrove dan penguasaannya untuk tambak serta masyarakat belum menyadari pentingnya fungsi ekologi hutan mangrove. Pemanfaatan hutan mangrove masih terbatas pada pengolahan buahnya untuk kebutuhan pangan.

## B. Saran

Kelembagaan lokal masyarakat di Desa Pantai Bahagia perlu diperkuat dengan membangun kemitraan antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, lembaga penelitian, perusahaan privat melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), dan lain-lain, khususnya untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya kelestarian hutan mangrove dan bentuk program pemberdayaan yang lebih intensif serta perlunya diinisiasi oleh pemerintah desa

untuk menerbitkan peraturan desa tentang bentuk akses masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, D., Qurniati, R., & Febryano, I. G. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.23960/jsl1730-41>
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, S. (2000). *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Jogja Offset.
- Bengen, D.G. (2008). *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor
- Duhari, R. (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kehutanan, K. L. H. (2017). Miliki 23% Ekosistem Mangrove Dunia, Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional Mangrove 2017. Retrieved February 6, 2018, from [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pes/browse/561](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pes/browse/561).
- Kementerian Kehutanan. (2013). *Luasan hutan mangrove di Indonesia*. Diunduh pada tanggal 4 april 2014. <http://kementeriankehutanan.com>.
- Marsudi, B., Satjapradja, O., Salampessy, L.M. (2018). Komposisi Jenis Pohon Dan Struktur Tegakan Hutan Mangrove. *Jurnal Belantara.*, 1(2), 115–122.
- Muhaerin, M. (2008). Kajian sumberdaya ekosistem mangrove untuk pengelolaan ekowisata di Estuari Perancak, Jembrana, Bali. (Tesis). Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Novianty, R., Sukajaya, S. dan Prihadi, D. J. (2011). Identifikasi kerusakan dan upaya rehabilitasi ekosistem mangrove di Pantai Utara Kabupaten Subang. *Jurnal Akuatika*, 2(2), 1-9.
- Pradana, Oky. Y., Nirwani., dan Suryono. (2013). *Kajian bioekologi dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove: Studi Kasus di Teluk Awur Jepara*. *Journal Of Marine Research*. 2(1), 54–61.
- Salampessy M.L., Lidiawati, I. (2017). Potensi Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Cemplang, Sub Das Cianten Hulu Timur Das



- Cisadane). *Jurnal Hutan Tropis*, 5 (2).
- Schmidt, A. (1987). *Property, Power, and An Inquiry into Law and Economic*. New York: Praeger.
- Sihite. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Lembaga Suadaya Masyarakat. Jawa Tengah
- Sari, P.Y., Salampessy, L.M., Lidiawati.I. (2018). Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan. *Jurnal Perennial*, 14(2), 78–85.